



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN  
DALAM ACARA  
IBADAH SYUKUR ULANG TAHUN PWKI KE-70**

*Jakarta, 28 Februari 2016*

**Yang terhormat :**

**Ketua Umum DPP PWKI, Ibu Sheila A. Lumempouw Salomo, SH;  
Sekretaris Umum DPP PWKI, Ibu Elly Tumuyu Siwabessy;  
Seluruh Panitia HUT PWKI ke-70, dan  
Hadirin sekalian yang saya hormati.**

**Syaloom,**

**Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua,**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kasih, karena atas berkat dan perlindunganNYA, kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Hari ini saya merasa berbahagia mendapat kehormatan untuk berbicara dalam rangka hari ulang tahun Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) yang ke - 70 Th. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh anggota PWKI di seluruh Indonesia atas 70 tahun PWKI telah berdiri di bumi Indonesia sebagai organisasi keagamaan yang ikut berkiprah dalam pembangunan bangsa dan negara RI. Semoga dengan peringatan yang ke-70 ini, PWKI dapat lebih memasyarakat dalam mengatasi permasalahan bangsa Indonesia.

### **Ibu-ibu hadirin yang saya hormati,**

Ibarat perjalanan kehidupan manusia, dalam usia 70 tahun banyak asam garam yang dirasakan dan telah tertempa dengan dinamika dan romantika perjuangan. Pengabdian PWKI kepada masyarakat dan bangsa dalam bidang sosial dan bidang pendidikan sudah tidak perlu diragukan lagi. Mudah-mudahan ke depan pengabdian tersebut dapat terus ditingkatkan sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan akan kapasitas sumber daya manusia yang semakin baik.

Status perempuan di Indonesia masih merupakan sub-ordinasi dari kaum laki-laki, sebagai individu perempuan Indonesia harus ditingkatkan kedudukan dan perannya. Demikian juga sebagai organisasi keagamaan perempuan harus ditingkatkan kualitas dan kemandiriannya. Persoalan pemberdayaan perempuan adalah persoalan yang sangat kompleks dan multi dimensi yang tak mungkin dapat ditangani dan dituntaskan oleh pemerintah saja. Peran serta masyarakat, baik secara individu maupun melalui organisasi perempuan keagamaan seperti PWKI mutlak sangat diperlukan, karena perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu terus dilakukan agar perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam pelaksanaan pembangunan serta dalam menikmati hasil-hasilnya.

### **Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,**

Kebijakan Menteri PP dan PA dalam Tahun 2016 ke depan yang merupakan prioritas adalah 3 End, yaitu: 1) mengurangi kasus-kasus kekerasan; 2) menghapus terjadinya perdagangan orang, dan 3) Mengurangi kesenjangan ekonomi/meningkatkan ekonomi bagi perempuan.

Dewasa ini dalam masyarakat terdapat peningkatan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dalam pertemuan ini semoga kita dapat disadarkan bahwa anak-anak dan perempuan di Indonesia belum aman ataupun belum memiliki rasa aman dari ancaman kejahatan serta kekerasan. Ini merupakan sebuah kenyataan yang harus kita hadapai dengan bijaksana, dengan berorientasi pada pemecahan masalah dan merupakan tanggung jawab kita bersama seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Kekerasan, baik terjadi pada perempuan maupun anak-anak di Indonesia masih menjadi gejala sosial yang memprihatinkan kita semua. Tindak kekerasan, baik berupa kekerasan fisik, emosi maupun seksual masih sering terjadi di mana-mana, di kota besar maupun di pelosok-pelosok, terjadi pada keluarga dengan tingkat sosial dan pendidikan yang tinggi maupun yang rendah, dilakukan oleh orang asing (Turis) ataupun justru oleh orang-orang terdekat yang seharusnya bertanggung jawab/melindungi bagi kehidupannya seperti orangtua, suami, saudara, paman, bibi atau sebagai guru.

Sesungguhnya kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun di ruang publik merupakan subkultur dan budaya kekerasan yang belakangan ini semakin menggejala di masyarakat. Sebagai umat Kristiani bagian dari masyarakat dan bangsa, kita harus segera menghilangkan budaya tersebut dari kebudayaan bangsa kita. Sebab setiap bentuk kekerasan hanya akan mengundang kekerasan yang lain. Setiap tindak kekerasan selalu membawa kerusakan, korban dan penyesalan. Kekerasan hendaknya tidak lagi dipergunakan oleh siapapun sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Terlebih lebih lagi bila kekerasan tersebut dilakukan terhadap anak-anak yang merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.

### **Ibu-ibu dan hadirin yang saya hormati,**

Sebagaimana diketahui, perdagangan orang saat ini telah berkembang luas menjadi kejahatan lintas negara dan bahkan lintas benua dengan keterlibatan jaringan sindikat organisasi kejahatan lintas negara (*Transnational Organize Crime*). Menghadapi tantangan kerja sindikat perdagangan orang ini memerlukan kerjasama yang lebih kuat dan strategis tidak saja kerjasama di dalam negeri antar lintas sektor pemerintah, masyarakat, dan swasta tetapi juga sangat diperlukan kerjasama antar negara khususnya negara tempat tujuan para Tenaga kerja Indonesia (TKI). Demikian juga kerjasama untuk meningkatkan pengawasan migrasi lintas batas antar negara. Dalam kesempatan yang baik ini saya mengingatkan dan meminta kepada PWKI bahwa persolan perdagangan orang atau *trafficking* adalah persolan bangsa dan harus menjadi komitmen bersama dari semua pihak untuk memeranginya sehingga dapat hilang dari bumi Indonesia. Komitmen bangsa Indonesia untuk memerangi perdagangan orang (perempuan dan anak) tertuang

dalam keputusan presiden (Keppres) nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A). Saya sangat menyadari bahwa dalam upaya pencegahan serta pembrantasan tindak pidana perdagangan orang ini tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan dibutuhkan penanganan dan intervensi dari berbagai pihak yang terkait, Untuk menanggulangnya, bukan semata-mata dari aspek hukum, namun hal-hal lain yang lebih mendasar di balik kejadian tindak pidana perdagangan orang itu sendiri juga sangat dibutuhkan kerjasamanya. Untuk itu semua maka pemerintah RI dengan diinisiasi DPR-RI Tahun 2007 telah mengesahkan UU-PTPPO (Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) No.21 Tahun 2007. Disamping itu telah banyak Regulasi atau peraturan yang dibuat Pemerintah untuk memerangi TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

**Ibu-ibu yang saya hormati,**

Pemenuhan hak ekonomi perempuan saat ini semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan dasar untuk mengantarkan kaum perempuan pada suatu tatanan perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, khususnya guna meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan-perbaikan, walaupun belum keluar sepenuhnya dari kondisi seperti yang diharapkan sejahtera untuk semua masyarakat. Pemutusan kerja masih terjadi diberbagai perusahaan, persaingan usaha menjadi lebih ketat. Banyak perempuan pengusaha yang kehilangan kontrak kerja dan pesanan karena pembeli maupun pengusaha besar telah menarik investasinya ke luar negeri. Kontribusi perempuan terhadap perekonomian di Indonesia sebenarnya sudah cukup tinggi, namun pada kenyataannya peran perempuan dalam perekonomian Indonesia seringkali tidak mendapat perhatian yang memadai. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai upaya peningkatan usaha ekonomi. Kita ketahui bersama, saat ini kondisi perempuan pengusaha kecil memang masih belum menggembirakan. Kendala terbesar yang dihadapi oleh perempuan pengusaha kecil, berkisar pada pemasaran dan permodalan. Pimpinan di semua Bank sekarang telah mulai membuka diri untuk menyalurkan uang kredit kepada para perempuan pengusaha kecil. Upaya ini dibantu melalui Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh akses permodalan melalui

bank. Diharapkan akses ini menjadi lebih lancar dan dapat direalisasikan dengan baik sehingga para perempuan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya.

Sebagai penutup, marilah kita mengingat kembali undang-undang telah menetapkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, maupun di dalam keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, tanggung jawab bagi perempuan dan anak memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat termasuk di dalamnya Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI). Marilah kita bersama-sama membangun iklim dan suasana yang positif, kondusif dan bersahabat. Untuk itu kepada PWKI, saya mengajak supaya dapat memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini.

Saya yakin, bahwa melalui Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) pasti dapat berperan dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada keluarganya masing-masing yang ada di tingkat ranting-ranting daerah.

Demikian, sambutan saya semoga ada manfaatnya. Selamat Ulang Tahun Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) ke 70, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua dalam karya serta pengabdian kita.

Terima kasih atas segala perhatiannya, Syaloom.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia

ttd

**Yohana Susana Yembise**

